

## **KEPEMIMPINAN WANITA MADURA**

### **Hasil Penelitian Dukungan Sosial-Budaya Terhadap Keberhasilan Kepemimpinan wanita “Srikandi” di Desa Pademawu Barat Kabupaten Pamekasan Madura**

**Achmad Jamaludin Karim\***

#### *Abstrak*

*Madura memiliki spesifikasi budaya yang berbeda dengan etnis budaya lain di Indonesia, sekaligus menjadi aspek menarik dalam khasanah budaya nusantara. Sejauh ini, berbagai aspek budaya Madura memberi sumbangan terhadap konsep kepemimpinan termasuk juga adalah kepemimpinan wanita Madura. Aspek-aspek yang menonjol adalah aspek dukungan sosial masyarakat, dukungan budaya dan yang berdampak kepada dukungan politik. Ketiga aspek ini menjadi faktor dominan dalam kepemimpinan wanita Madura.*

*Kata Kunci : Kepemimpinan wanita dan wanita Madura*

#### **1 Pendahuluan**

Keterlibatan wanita dalam bidang politik dan dalam proses pengambilan keputusan kebijakan publik di Indonesia memiliki akar historis yang cukup panjang (Prisma, 1996). Sejarah mencatat adanya dua tokoh wanita, yakni Sultanah Safiatudin dari Aceh dan Siti Aisyah We Tenriolle dari Sulawesi Selatan. Sultanah Saifatudin naik tahta tahun 1641, menggantikan suaminya, Sultan Iskandar Muda. Beliau berhasil menggabungkan kehidupan hukum, kesusasteraan, dan ilmu pengetahuan, sehingga muncul penulis besar semacam Hamzah Fansuri dan Nuruddin ar Raniry. We Tenriolle naik tahta tahun 1856. Selain sebagai kepala pemerintahan, We Tenriolle juga merupakan sastrawan yang mahir, dengan karyanya *La-Galigo* dalam bahasa Bugis setebal 7000 halaman (Baried, 1989). Dua contoh di atas merupakan refleksi bahwa negara kita sudah cukup punya bukti sejarah kepiawaian atas kepemimpinan wanita. Pada

---

\* **Dr. Achmad Jamaludin Karim, M.Si**, adalah Dosen Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Madura

masa kemerdekaan tokoh-tokoh wanita juga menduduki posisi-posisi penting, baik dalam pemerintahan maupun lembaga legislatif.

Namun demikian, terdapat kesan bahwa keterlibatan wanita dalam lembaga legislatif, lebih dilatarbelakangi oleh faktor jabatan suaminya. Barangkali kesan tersebut tidak terlalu salah akibat adanya citra negatif rumah, misalnya berburu di hutan, sementara wanita bertugas menyiapkan kebutuhan keluarga di dalam rumah, seperti memasak, mengasuh anak, dan semacamnya. Hal ini sesuai dengan Cozens and West (ed., 1993 : 185) yang menyatakan bahwa: *"historically the external world has been the business of men. women took care of the"* tentang kehidupan politik: bahwa politik itu kotor, keras, penuh intrik, dan semacamnya. Kesan tersebut seolah membenarkan realitas bahwa jumlah wanita yang berkiprah dalam dunia politik relatif kecil, termasuk di negara-negara yang tingkat demokrasi dan persamaan hak dasarnya cukup tinggi.

Seiring dengan dinamika zaman, modernisasi, dan globalisasi informasi, serta keberhasilan gerakan emansipasi dan feminisme, sikap dan peran wanita dalam dunia politik mulai mengalami pergeseran. Wanita tidak lagi hanya berperan sebagai ibu rumah tangga yang menjalankan fungsi reproduksi dan pekerjaan sektor domestik, tetapi sudah aktif berperan di sektor publik, baik sosial, ekonomi, maupun politik. Peran peran yang biasa dilakukan oleh pria sudah banyak yang mulai diambil alih oleh para wanita.

John Naisbitt dan Patricia Aburdene (1990: 45) pernah meramalkan mulai tahun 1990-an sebagai dekade kepemimpinan wanita. Pandangan ini tidak terlalu keliru jika melihat realitas tentang banyaknya kepala negara atau kepala pemerintahan yang dipegang oleh wanita, seperti Perdana Menteri Margaret Thatcher (Inggris), Presiden Corazon Aquino (Philipina), Perdana Menteri Indira Gandhi (India), Perdana Menteri Benazir Butho (Pakistan), termasuk presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri, dan beberapa pemimpin wanita lainnya di dunia saat ini.

Masyarakat Desa Pademawu Barat merupakan komunitas heterogen pinggiran kota. Pola pemikiran dan tingkat pendidikannya sudah maju, sehingga lebih terbuka menerima informasi. Tentunya, kondisi masyarakat yang demikian cenderung lebih rasional dalam menyikapi persoalan-persoalan kemasyarakatan dibandingkan dengan masyarakat pedesaan yang homogen. Masyarakat mulai mengalami pergeseran dalam menentukan seorang kepala desa; dasar pertimbangannya bukan lagi faktor keturunan

dan norma agama, namun faktor pertimbangan rasionallah yang menyebabkan seorang wanita terpilih. Dengan kata lain, masyarakat memilih kepala desa bukan karena faktor keturunan sebagai dasarnya, namun lebih karena kecakapan, kemampuan bersosialisasi, dan kemampuan melaksanakan berbagai program. Hal ini menunjukkan bahwa wanita juga memiliki basis kekuatan dan kekuasaan dan hal tersebut termanifestasikan melalui perilakunya pada masyarakat.

Sehubungan dengan itu salah satu aspek yang dibutuhkan didalam kepemimpinan yang dilakukan oleh wanita adalah dukungan sosial-budaya dari masyarakat dimana ia melaksanakan tugas kepemimpinannya. Oleh karena itu kajian ini memfokuskan pandangannya terhadap persoalan dukungan sosial dan budaya terhadap kepemimpinan wanita sebagai kepala desa di Pamekasan Madura.

## **2 Basis Dukungan Sosial, Budaya Dan Politik Terhadap Kepemimpinan Wanita Sebagai Kepala Desa**

### **2.1 Basis Dukungan Sosial**

Kepala desa tidak cukup hanya mempunyai kemampuan manajerial, namun perlu kekuatan dari dukungan basis sosial. Basis dukungan sosial merupakan salah satu kunci kesuksesan dalam proses pencalonan kepala desa. Karena dalam proses demokrasi munculnya rekrutmen seorang tokoh masyarakat dalam wilayah kultur pedesaan akan sangat berlainan dengan munculnya tokoh di wilayah perkotaan. Fenomena munculnya tokoh di perkotaan banyak dipengaruhi atau harus diimbangi dengan dukungan sisi finansial yang kuat. Dalam pengertian pola rekrutmen adanya tokoh di wilayah perkotaan harus didukung dengan kekuatan finansial yang bisa mengantarkan seseorang menjadi tokoh dalam pemerintahan atau elite kota.

Sementara dalam wilayah pedesaan pola munculnya tokoh harus diimbangi dengan kekuatan basis dukungan masyarakat (sosial) yang sangat kuat. Lekatnya perilaku maupun tingkah laku dari seorang tokoh pedesaan akan turut mengantarkan seseorang menjadi tokoh di pedesaan atau tidak. Dalam pengertian, meskipun seorang tokoh pedesaan atau elite desa dengan basis kekuatan finansial yang sangat kuat, namun secara sosial di hadapan masyarakat telah “cacat”, maka akan sangat sulit untuk memperoleh dukungan massa dari masyarakat desa

Rekrutmen tokoh pedesaan sangat tergantung dari bentuk atau basis dukungan masyarakat seiring dengan tingkah laku seseorang di wilayah pedesaan. Dengan demikian perilaku seorang tokoh di wilayah pedesaan akan sangat mempengaruhi dengan munculnya tokoh elite pedesaan. Seperti halnya wanita Kepala Desa Pademawu Barat, mempunyai dukungan sosial dari masyarakat dalam proses Pilkades. Sebelumnya Srikandi merupakan istri mantan kepala desa Brotoseno (alm). Sebagai istri kepala desa, konsekwensinya harus selalu mendampingi kegiatan kepala desa. Bahkan banyak aktivitas yang berbasis wanita pun harus selalu diikuti dan dimonitor demi kelanggengan posisi jabatan kepala desa. Mulai dari aktivitas yang diperankan sebagai istri kepala desa seperti Ketua Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK), kegiatan sosial keagamaan (*yasinan*, *dhiba'an*) dan juga mengkoordinasi kegiatan sosial lainnya. Aktivitas seperti Posyandu, Dasawisma, merupakan bentuk sosialisasi istri kepala desa yang bersifat mengakar pada masyarakat bawah.

Lebih konkret, bahwa rekrutmen elite tokoh desa sangat terkait erat dengan persoalan nilai-nilai budaya maupun etika moral. Ketika moral atau etika elite desa menunjukkan tanda-tanda baik maka akan dengan mudah dalam mencari legitimasi dukungan masa. Namun bisa sebaliknya, meski dari sisi finansial cukup bisa membawa pengaruh. Akan tetapi manakala norma, etika, maupun moral telah banyak menyimpang dari ketentuan tak tertulis di masyarakat, niscaya akan sulit sekali untuk mencari legitimasi dalam kepemimpinan elite desa.

Perilaku kepemimpinan wanita kepala desa yang selalu bisa menempatkan diri, bersosialisasi dengan warga melalui beberapa aktivitas sosial maupun religius membawa konsekwensi pada pengentalan hubungan masyarakat dengan kepemimpinan wanita kepala desa. Hingga akhirnya walaupun wanita kepala desa bisa diterima di tengah warganya akibat dari menyatunya wanita kepala desa dengan masyarakat yang dimulai saat menjadi mantan istri kepala desa terdahulu (Brotoseno). Hasil proses sosialisasi tanpa pamrih dari Srikandi cukup banyak membantu dalam pemilihan calon kepala desa. Saat kepala desa lama Brotoseno –suaminya sendiri-- almarhum sebelum jabatan akhirnya tahun 1989, masyarakat secara nyata mendukung calon kepala desa wanita.

Dukungan warga atas kepemimpinan wanita kepala desa berdasarkan pertimbangan rasional sekaligus bentuk-bentuk sosialisasi maupun karya nyata dari calon kepala desa wanita. Bentuk legitimasi masyarakat atas

dukungannya bukan persoalan rekayasa, maupun persoalan kekuatan finansial, namun memilih wanita kepala desa karena faktor kemampuan dalam memberikan pengayoman pada masyarakat. Dalam arti, bahwa kepemimpinan kepala desa dan keinginan warga memilih kepemimpinan wanita bukan karena pertimbangan sesama kelompok wanita, namun lebih dari pertimbangan-pertimbangan keterlibatan kepemimpinan wanita sebelumnya dalam persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan.

Sebagai bukti konkret terpilihnya wanita kepala desa secara demokratis adalah ketika terjadi pemilihan kepala desa (Pilkades, 8/2/1994). Pada saat pemilihan yang menjadi kompetitornya hanya satu, yakni seorang laki-laki bernama Sukardi yang berprofesi sebagai guru. Praktis yang menjadi calon hanya dua orang, satu pria dan satu wanita. Saat pemilihan terjadi dengan lancar dan tertib. Srikandi memperoleh suara 2.850 (78%), lebih, dibanding suara Sukardi yang hanya memperoleh 750 (20,5%) dari keseluruhan hak pilih sejumlah 3.650 dan jumlah suara yang tidak sah ada 50 (1,5%). “Ini merupakan kemenangan dari dukungan masyarakat atas Srikandi, bukan karena yang lain,” kata salah satu saksi pemilihan kepala desa waktu itu

Ini merupakan bukti bahwa wanita kepala desa mempunyai dukungan basis sosial yang kuat dan mengakar pada masyarakat Pademawu Barat. Oleh masyarakat, Srikandi dipandang mampu secara fisik, mental, dan sosial. Tentu ini memberikan manfaat ganda bagi kepala desa wanita; secara mayoritas masyarakat telah memilihnya dan selanjutnya masyarakat tentu mendukung segala program pembangunan desa.

Meski sempat isu beredar adanya praktek *money politic*, kabar tersebut sulit untuk dibuktikan. Banyak pendukung Srikandi yang menengarai bahwa isu *money politic* tingkat desa dihembuskan guna menggembosi suara Srikandi.

Dari paparan responden yang ditemui baik tingkat RW maupun para petani menandakan bahwa Srikandi memang mempunyai hubungan sosial dengan masyarakat sangat baik dan bersahaja. “Kalau tanpa dukungan masyarakat, dan menang atas *money politic* tentu akan menyulitkan dalam pengembangan program di kemudian hari,” kata Srikandi. Barangkali inilah perbedaan nuansa pola rekrutmen elite tokoh desa dengan elite tokoh kota. Dalam masyarakat perkotaan isu *money politic* adalah hal yang lumrah dan sudah banyak yang memberikan keterangan perihal tersebut. Artinya rekrutmen kepemimpinan masyarakat kota akan selalu identik dibarengi

dengan nuansa-nuansa dari problema *money politic*. Ini bisa dipahami dalam rekrutmen masyarakat kota terhadap kepemimpinan akan selalu dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan finansial, tanpa mempedulikan dari perilaku elite tersebut.

Sementara, pada elit desa dalam rekrutmen akan selalu diimbangi dengan perilaku elit atau tokoh desa sendiri. Meski dalam pemilihan kepala desa di Desa Pademawu Barat beredar kabar terjadinya isu *money politic* yang dilakukan oleh Srikandi guna mempertahankan status quo-nya sebagai penerus keturunan para kepala desa, rupanya juga sangat sulit untuk dibuktikan. Meskipun, misalnya dalam pemilihan tersebut wanita kepala desa memang betul terlibat dalam *money politic* tanpa diimbangi perilaku yang memadai sebagai pemimpin niscaya tidak akan terpilih.

Kemudian, manakala melihat data bahwa pada Desa Pademawu Barat komposisi penduduk wanita yang tamat PT berjumlah 51, sementara pria yang tamat pada PT hanya berjumlah 3 orang. “Saya lebih memilih ibu, karena kami sama-sama sebagai wanita,” ujar Muslikah informan yang tamat IAIN Sunan Ampel yang kini berprofesi sebagai guru ngaji. Dari perbandingan jumlah wanita dengan pria jelas sangat jauh. Dari data tersebut bisa disimak manakala seorang wanita akan mempunyai ikatan emosional dalam memilih wanita.

## 2.2 Basis Dukungan Budaya

Selain dukungan sosial, faktor dukungan budaya masyarakat sangat penting. Karena untuk menjadi pemimpin yang dalam perilakunya harus selalu bisa mengajak, mempengaruhi orang lain untuk ikut dalam aktivitasnya, maka sangat perlu sekali memahami kultur atau budaya masyarakat yang akan dipimpinnya. Ketika terjadi pemilihan kepala desa di Pademawu Barat, mulanya pemimpin wanita banyak mengalami hambatan-hambatan karena faktor kultur atau budaya. Dalam pengertian, masyarakat Madura yang notabene mayoritas Islam akan selalu memandang dan memahami bahwa wanita harus selalu yang dipimpin. Dalam pengertian kultur Madura yang lain bahwa wanita merupakan bagian yang nomor dua. Stereotip yang berkembang adalah bahwa pria adalah pemimpin dan wanita merupakan *second class* alias orang yang selalu dinomor duakan yang notabene harus selalu berhubungan dengan masalah tata rumah tangga. Urusan dapur, di belakang, dsb merupakan urusan wanita. Sementara pria adalah urusan mencari nafkah dan berdiri di garda depan. Pemahaman kultur

semacam ini awalnya memang cukup bisa merepotkan wanita kepala desa untuk maju berjuang memimpin Desa Pademawu Barat.

Namun, dalam sejarah Madura, saat ketika masih dalam wilayah kerajaan pernah dipimpin oleh seorang wanita bernama Nyai Banu sebagai putri tunggal dari kiai Wonoratu di Pandingan dengan sebutan Lawangan Daja. Dalam kultur Madura, sejarah merupakan sesuatu selalu melekat pada masyarakat desa Pademawu Barat. Ketika pada pemerintahan Nyai Banu ternyata segala roda pemerintahan terbukti mengalami suatu kemajuan. Selain itu nuansa kepemimpinannya lebih banyak menerapkan manajemen “keibu-ibuan”. Dalam pengertian, lebih banyak menyentuh hati warganya dengan sentuhan-sentuhan seorang wanita. Ternyata, dalam sejarah kepemimpinan Nyai Banu cukup sukses dan melekat sekaligus melegenda pada hati masyarakat Madura khususnya Desa Pademawu Barat.

Karena cerita sejarah tersebut, banyak warga Pademawu Barat ada harapan akan bisa terulang kembali jaman kemajuan Pademawu Barat dengan munculnya kepemimpinan wanita kepala desa di Desa Pademawu Barat. Harapan itu sedikit terkabul manakala Srikandi menjadi wanita kepala desa di Pademawu Barat. Kemajuan dan jaman keemasan ketika Nyai Banu memimpin saat itu akan bisa menitis kembali pada kepemimpinan wanita kepala desa. Tidak berlebihan jika akhirnya masyarakat Pademawu Barat dalam pemilihan Pilkades memilih Srikandi menjadi wanita kepala desa salah satu faktornya adalah seperti tersebut di atas.

Tidaklah mengherankan manakala beberapa masyarakat sebelumnya menyangsikan keberadaan kepemimpinan wanita kepala desa akhirnya bisa melebur karena faktor dari keberadaan sejarah dari kepemimpinan Nyai Banu. Maka kalaupun pada permulaan wanita kepala desa mengalami sedikit gangguan dalam perolehan dukungan secara kultur, dengan sejarah Nyai Banu sedikit banyak menolong terangkatnya wanita kepala desa memimpin Desa Pademawu Barat.

Meskipun demikian, secara kultur di Madura masih banyak pemikiran yang melekat bahwa kepemimpinan yang ideal harus dipegang oleh kaum pria. Kelompok ini banyak diwarnai dari para ustad atau kiai yang selalu memahami kepemimpinan dari konteks Islam. Pemahaman akan hal tersebut juga tidak bisa disalahkan, hal ini dikarenakan masyarakat Madura selalu identik dengan Islam dalam menjalani roda kehidupan. Meskipun pada akhirnya juga cukup bisa mentolelir keberadaan wanita dengan memberikan kesempatan untuk ikut berkompetisi menjadi kepala desa.

Bagaimanapun budaya masyarakat tetap menjadi sendi-sendi yang menentukan keabsahan kepemimpinan.

Pada akhirnya lahir dua kubu dalam memahami realitas kepemimpinan wanita dari prespektif Islam ini, akhirnya dalam pemilihan kepala desa pun kepemimpinan wanitalah yang memenangkan kompetisi ini. Dari kemenangan ini seolah-olah membuktikan bahwa keberadaan kepemimpinan wanita di Madura dapat dijalankan. Pada akhirnya beberapa kiai yang kurang mendukung, pada gilirannya hanya bisa melihat fakta. Alhasil kiai pun tak ada pilihan lain kecuali menerima kenyataan kepala desa Padewamu Barat adalah wanita.

Dimunculkannya pandangan agama tersebut bukan dalam konteks dan perspektif teologis, akan tetapi dalam konteks dan perspektif sosiologis tentang bentuk pemahaman keberagamaan yang berkaitan dengan kepemimpinan. Jadi, perspektif agama bukan persoalan benar-salah atau halal-haramnya wanita menjadi kepala desa, tetapi didukung atau tidaknya wanita menjadi pemimpin sebagai kepala desa. Dengan demikian, terlihat bahwa secara etika dan moral wanita juga didukung untuk menjadi kepala desa. Hal demikian dimungkinkan oleh keberagaman masyarakat desa Pademawu Barat yang memberikan peluang bagi wanita untuk tampil menjadi pemimpin.

Selain itu, perspektif gender sering dipahami dengan persamaan kodrat. Padahal gender lebih menekankan pada bentuk peran. Artinya perlu dibedakan peran dengan kodrat. Wanita dan pria jelas mempunyai kodrat yang berbeda dan merupakan fitrah dari Alloh SWT. Sementara peran ini menunjuk pada gender. Artinya antara pria dan wanita punya hak atas peran dengan segala macam prestasi.

Sebagai seorang wanita, tentunya perilaku kepemimpinan Srikandi sangat berbeda dengan pria dalam melakukan pendekatan kepada masyarakat. Perilaku yang dimaksud bukan dalam konteks gender, yang mempolakan dirinya untuk mengikuti karakter pria, namun dalam kerangka institusi, yang secara kebetulan kepala desanya adalah wanita.

Dalam konteks institusi, sebagai kepala desa dan pemimpin di desa, tentunya kepala desa akan menjadi tempat mengadu, tempat semua persoalan masyarakat diselesaikan. Tentu saja, secara kodrati, wanita sebagai kepala desa mempunyai keterbatasan-keterbatasan, tetapi moral sosial memberikannya toleransi.



### **2.3 Basis Dukungan Politik**

Munculnya wanita kepala desa di Desa Pademawu Barat, awalnya, sekretaris desa (carek) Moh. Hosen, melontarkan nama Srikandi untuk dicalonkan sebagai kepala desa menggantikan mantan kepala desa (alm. Brotoseno). Pemikiran pribadi tersebut disosialisasikan kepada pejabat dan aparat desa serta tokoh masyarakat. Dasar pertimbangan memunculkan Srikandi, sebagaimana dijelaskan pada peneliti, adalah “bahwa selain karena istri mantan kepala desa, Srikandi juga mempunyai dukungan sosial, dukungan budaya, dan mempunyai pengalaman dalam organisasi pemerintahan. Oleh karena itu, Srikandi mempunyai peluang dan kemampuan untuk menjadi kepala desa selanjutnya”.

Dukungan tokoh masyarakat mulai mengkristal untuk menampilkannya menjadi wanita kepala desa. Namun demikian, aparat desa masih memberikan kesempatan kepada pihak lain yang ingin ikut mencalonkan diri. Srikandi dengan terbuka menyampaikan kesiapannya untuk dicalonkan, namun tetap merendah atas kekurangan-kekurangannya sebagai manusia. Maka terpilih lah kepala desa wanita dengan mayoritas suara masyarakat

Melihat dari basis dukungan politik kepemimpinan wanita kepala desa Pademawu Barat antara lain karena memang secara politis dalam pemerintahan, wanita kepala desa Pademawu Barat baik dari pemerintahan desa maupun kecamatan lain mendukung kepemimpinan wanita. Dukungan politik sebagai kepala desa dari tingkat atasan adalah pada tingkat kecamatan baik dari lingkungan kecamatan Pademawu maupun kecamatan yang lain. Kemudian dalam tingkatan kabupaten pun munculnya kepemimpinan wanita di Pademawu Barat juga bisa diterima.

Indikasi dukungan munculnya kepemimpinan wanita kepala desa di desa Pademawu Barat, bisa dilihat ketika terjadinya proses pengajuan pencalonan kepala desa. Paling tidak secara administratif, manakala tidak ada dukungan pada kepemimpinan wanita tentunya sejak dini akan selalu mengalami hambatan. Namun buktinya berkas maupun surat pengajuan dan curriculum vitae dari Srikandi bisa sampai pada pemerintahan atas tanpa mengalami hambatan maupun kesulitan.

Dari proses awal pencalonan menjadi kepala desa, secara administrasi pun sebenarnya pihak pemerintahan tingkat kecamatan dan kabupaten cukup bisa menerima kehadiran kepemimpinan wanita. Itu tandanya secara politis

dukungan pemerintahan atas terhadap munculnya kepemimpinan wanita akan terbuka tanpa membedakan persoalan gender maupun kodrat. Bagi kalangan birokrat tingkat kecamatan dan kabupaten tidak akan selalu mempersoalkan wanita atau pria dalam memimpin, namun lebih pada bentuk program, maupun kemampuan mengimplementasikan program dari atas maupun hasil inisiatif sendiri.

Salah satu informan peneliti (Camat Pademawu) memberikan pernyataan perihal keberadaan dan proses munculnya Srikandi menjadi wanita kepala desa di Desa Pademawu Barat. “Diterimanya Srikandi sebagai salah satu calon kepala desa dengan berbagai pertimbangan dan diskusi yang panjang, namun semuanya itu berpulang kepada masyarakat Desa Pademawu Barat sendiri. Meskipun demikian, harus diakui bahwa semasa menjadi Ketua PKK, Srikandi telah mencatat prestasi sebagai penggerak PKK terbaik I dan juga sebagai istri kepala desa yang mewarisi perilaku kepemimpinan sebagaimana suaminya. Atas dasar itu, kemampuannya telah teruji, baik sebagai istri kepala desa yang membangun masyarakat melalui PKK dan mengkoordinasi kegiatan pembangunan lainnya, maupun sebagai salah satu pemikir pembangunan melalui LKMD”.

Bisa dimengerti meskipun kepala desa secara struktur organisasi pemerintahan di bawah naungan tingkat kecamatan maupun kabupaten, dari pihak kecamatan sendiri menyerahkan sepenuhnya pemilihan atas inisiatif bawah. Pihak kecamatan maupun kabupaten tidak ikut campur, dalam pengertian mempunyai calon lain dari struktur atas.

Dari beberapa kelebihan tersebut, pihak kecamatan tidak ada alasan untuk menolaknya. Apalagi didukung secara mayoritas dari para warga Pademawu Barat. Walaupun demikian, diakui oleh camat bahwa masih banyak suara yang menyangsikan. Namun yang terpenting adalah memberikan kesempatan dalam rangka mengakomodasi suara masyarakat. Adanya kesangsian sebagian orang lebih terfokus pada keberadaannya sebagai wanita, bukan pada kemampuan dalam memimpin. Jika hanya persoalan tersebut, tentunya tidak terlalu prinsip untuk melegalisasi wanita menjadi kepala desa.

Sebelumnya, dari basis dukungan sosial, Srikandi pun telah banyak menjalin sosialisasi pada pemerintahan desa, baik dari dalam maupun dari luar desa. Selain itu, Srikandi juga menjalin hubungan baik dengan aparat di tingkat kecamatan dan kabupaten. Oleh karena itu, kemunculannya telah mendapat dukungan bukan saja dari dalam desa, akan tetapi juga luar desa di

tingkat kecamatan dan kabupaten. Hal ini memberikan gambaran bahwa kepala desa wanita juga mempunyai dukungan dari atas, sehingga kemunculannya tanpa hambatan. Apalagi Srikandi merupakan satu-satunya wanita kepala desa di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan Madura.

Berdasarkan ilustrasi tersebut, menjadi seorang kepala desa tidak cukup hanya dengan satu bentuk dukungan namun membutuhkan dukungan mulai dari sosial, budaya, maupun politik. Sebagai bukti atas ilustrasi tersebut, bahwa menjadi wanita kepala desa melalui dukungan sosial adalah dengan basis massa dalam pemilihan kepala desa merupakan satu bukti untuk melegitimasi sebagai munculnya kepala desa. Kemudian secara kultur atau budaya, dengan munculnya Nyai Banu sebagai pemimpin wanita pertama di Madura menjadi legenda bagi masyarakat guna memilih Srikandi sebagai kepala desa. Dengan harapan dengan kepemimpinan wanita bisa memberikan nuansa lain bagi jalanya roda pemerintahan. Selanjutnya dari sisi politis, bahwa keberadaan kepemimpinan wanita pada tingkat desa yang nota bene masih dibawah “kekuasaan” atas haruslah mempunyai dukungan politik baik tingkat pemerintah atas semacam kecamatan maupun kabupaten. Hal ini bisa dimengerti karena program-program pemerintahan desa seringkali merupakan perpanjangan tangan dari program tingkat pemerintah daerah maupun tingkat pusat.

Atas dasar itu, dengan modal dukungan sosial, budaya, dan politik, serta pengalaman (Ketua PKK dan Ketua II LKMD), Srikandi memberanikan diri untuk maju dan ikut dalam pemilihan kepala desa pada tahun 1994. Untuk tujuan itu, Srikandi juga telah mendapat izin dari anak-anaknya, keluarga, dan tokoh masyarakat setempat.

Dalam melaksanakan aktivitasnya sehari-hari untuk melayani masyarakat, Srikandi menempati kantor dan balai desa yang cukup representatif untuk ukuran masyarakat desa. Dengan ruang yang terpisah dengan staf lainnya, ia merasa lebih leluasa dalam berdialog, berkomunikasi dengan masyarakat yang membutuhkan pelayanannya. Untuk itu, Srikandi memang harus dapat membuktikan obsesinya sendiri bahwa sebagai pemimpin desa, ia harus dapat meninggalkan sesuatu yang baik dan berguna bagi masyarakat agar kelak orang akan mengenang jasa-jasanya. Di samping itu, dirinya ingin menghapus keraguan sementara orang akan kemampuan wanita menjadi pemimpin (kepala desa).

Meskipun begitu Srikandi cukup bisa membaca keadaan bahwa bagaimanapun terpilih menjadi kepala desa juga atas doa maupun dukungan dari pemerintah atas. Kepala desa wanita bisa diterima oleh kalangan bawah juga dikenal oleh pejabat kalangan atas.

Dari beberapa hal yang telah diuraikan di atas bahwa kepemimpinan wanita kepala desa Pademawu merupakan kepemimpinan yang unik sekaligus spesifik. Unik dan spesifiknya disebabkan karena disaat kepemimpinan wanita kepala desa mendapat tantangan keras dengan dalih legalitas dari konteks Islam, namun keberadaan wanita di tengah kultur masyarakat Madura yang identik dengan Islam justru muncul wanita kepala desa di tengah tekanan-tekanan baik kultur dan sosial.

### 3 Kesimpulan

Kepemimpinan wanita Madura merupakan realitas yang ada di Madura saat ini, walaupun dalam konteks keagamaan Islam kehadirannya masih menjadi polemik sekelompok masyarakat Islam di Madura disebabkan karena faktor penafsiran nilai-nilai keislaman yang berbeda, namun dalam konteks sosial, budaya dan politik kepemimpinan wanita Madura mendapat dukungan sehingga kehadiran Srikadi sebagai salah satu pelopor sosok pemimpin wanita di Madura dipandang sebagai realitas fenomenal sebagai jalan untuk membuka peluang terhadap lahirnya pemimpin-pemimpin wanita Madura di waktu yang akan datang.

Srikandi dipandang sebagai sosok yang menarik karena di samping sebagai pribadi yang mampu melawan arus budaya patriachi, namun juga sosok yang mampu menunjukkan bahwa wanita Madura memiliki kemampuan setara dengan laki-laki dalam hal memimpin masyarakat. Dalam konteks nasional, Srikandi adalah sosok yang dapat dijadikan cermin kepada masyarakat lain di Indonesia bahwa wanita Madura telah maju dan memiliki kemampuan yang setara dengan kemampuan yang dimiliki oleh laki-laki.()

-----

## DAFTAR PUSTAKA

- Aribowo, 1994. *"Potret Politisi Wanita"*. laporan penelitian. Lembaga Penelitian. Universitas Airlangga.
- Alfer J., Khan. 1969. *Theori and Practice of Social Planning*. New York : Russel Sage Foundation.
- Bemmelen, Van. 1993. *Gender and Development : What is New?*. Masyarakat Indonesia XX.
- Beratha, I Nyoman. 1982. *Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Bustami. A. Latif. 1990. *Masuk dan Berkembangnya Agama Islam di Pulau Madura*. Majalah IKA IKIP Malang.
- Cribbin, James J. 1985. *Leadership : Strategies for Organizational Effectiveness*. New York : Amacom.
- Djanaid, Djanalis, 1994. *Kepemimpinan teori dan Praktek*. Indonesia Multy Managemen. Malang.
- Fakih, Mansur, 1996, *Menggeser Konsepsi Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Hasan, Taman. 1979. *al-Lughat al-Arabiy Ma'naahaa wa Mabnaahaa*. al-Haiah al-Misriyah al-Amahli al-Kutab. Mesir..
- Hijab, Nadia. 1988. *Women Power: The Arab Debate on Women at Work*. New York : Cambridge University Press.
- Ismani H.P, 1991. *Sosiologi Pembangunan Desa*, PPIS dan FIA Unibraw. Malang.
- Jonge, Huub, 1989. *Madura Dalam Empat Zaman, Perdagangan, Perkembangan Ekonomi dan Islam*, PT, Gramedia, Jakarta.
- Jordaan, RE. 1985. *Folk Medicine in Madura (Indonesia)*, Disertasi. Universitas Leiden, Leiden. Belanda.
- Kotter, Jhon P.. 1988. *The Leadership Factor*, The Free Press, New York.

- Lauri, Larwood and, Barbara A. Gutek, 1984, "Women at Work in USA", dalam Marilyn J. Davidson and Cory L. Cooper, *Working Women, An International Survey*, : John Wisley & Sons Ltd., New York.
- Naisbitt, John dan Patricia, Aburdene. 1990. *Megatrends 2000*. Jakarta : Binarupa Aksara.
- Tjokrowinoto, Moeljarto. 1996. *Pembangunan Dilema dan Tantangan*, Yogyakarta.
- Van Meter, Donald S. and Carl E. Van Horn. 1975. *The Policy Implementation Process a Conceptual Frame Work in Administration on Society*, Sage Publication. Beverly Hills
- Widodo, Joko. 2000. *Rekonstruksi teori-teori sosial*. Pascasarjana Untag, Surabaya
- Yukl, Gary. 1994. *Kepemimpinan dalam organisasi* terjemahan oleh Jusuf Udaya, 1998. Prenhallindo. Jakarta.